JURNAL PELAYANAN PASTORAL
ISSN: 27471284
Tahun (2025), Vol. (6) No. (1), Bulan (April), p. (52-61)
PENERBIT STP-IPI MALANG

GEREJA DAN SITUASI KETIDAKADILAN BERBASIS GENDER DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Maria Cristina Dodalwa[*1], Teofanne Nurinik Wea[2], Antonius Mbukut[3]
[1,2,3]Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia
[*]Email: dodalwarmetin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidakadilan berbasis gender di provinsi Nusa Tenggara Timur dan menerangkan sikap gereja dalam berhadapan dengan situasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan. Peneliti membaca buku-buku, jurnal, laporan penelitian dan berita-berita di media massa online maupun cetak mengenai ajaran Gereja Katolik dan situasi ketidakadilan gender dalam konteks Nusa Tenggara Timur. Data-data yang diperoleh dari hasil bacaan kemudian diinterpretasi seturut perspektif terori gender dan selanjutnya ditelaah lebih jauh menurut perspektif teologi Kristen. Berdasarkan studi ini ditemukan bahwa ketidakadilan berbasis gender merupakan fakta sosial yang terjadi di hampir semua wilayah NTT. Faktor-faktor pemicu ketidakadilan berbasis gender tersebut adalah budaya patriarki yang terlalu dominan, kebijakan pemerintah yang kurang ramah terhadap perempuan dan anak-anak dan tafsiran agama yang keliru. Gereja Katolik harus betul-betul menyatakan keberpihakan kepada kaum perempuan dan merumuskan kebijakan-kebijakan pastoral yang ramah terhadap perempuan dan anak-anak. Keterbatasan utama studi ini adalah kurangnya data berdasarkan riset lapangan termutakhir. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar dibuat suatu kajian lapangan yang mendalam mengenai ketidakadilan berbasis gender di NTT.

Kata Kunci: Dialog, Gender, Gereja, Ketidakadilan, NTT

Abstract

This study aims to describe the forms of gender-based injustice in East Nusa Tenggara province and explain the attitude of the church in dealing with the situation. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. Data sources were obtained through literature study. Researchers read books, journals, research reports and news in online and printed mass media regarding the teachings of the Catholic Church and the situation of gender injustice in the context of East Nusa Tenggara. The data obtained from the reading were then interpreted according to the perspective of gender theory and further examined from the perspective of Christian theology. Based on this study, it was found that gender-based injustice is a social fact that occurs in almost all regions of NTT. The factors that trigger gender-based injustice are an overly dominant patriarchal culture, government policies that are less friendly to women and children, and erroneous religious interpretations. The Catholic Church must truly declare its partiality to women and formulate pastoral policies that are friendly to women and children. The main limitation of this study is the lack of data based on up-to-date field research. Therefore, the researcher recommends that an in-depth field study on gender-based injustice in NTT be conducted

Keywords: Church, Dialog, Gender, Injustic, NTT

is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License

JURNAL
PELAYANAN
PASTORAL
ISSN: 2747-1284
Tahun (2025), Vol. (6) No. (1), Bulan (April), p. (52-61)

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah yang memiliki suku dan budaya yang beraneka ragam. Menurut Kewuel (2017), realitas ini perlu dibedah dalam diskusi yang mendalam terkait pluralisme, mulitikuluralisme, dan batas-batas toleransi. Di antara beragamnya suku dan budaya di NTT, hanya ada dua suku yang menganut sistem matrilineal, yakni suku Ngada di Flores bagian tengah dan sebagian suku di Kabupaten Malaka di Pulau Timor. Sementara itu, semua suku lain di NTT, menganut sistem patriarkal yang cukup ketat. Sekalipun menganut sistem matrilineal, keistimewaan penghormatan terhadap laki-laki tetap kental di dua wilayah ini. Hal ini ditandai oleh tingginya penghormatan terhadap saudara laki-laki dari ibu atau yang biasa disebut om. Saudara laki-laki ibu memiliki kedudukan istimewah dalam keluarga dan berpengaruh dalam setiap keputusan penting dalam kehidupan keluarga.

Fakta sosial lain mengenai masyarakat NTT adalah bahwa sebagian besar masyarakat NTT merupakan umat Kristiani. Mereka memeluk agama Katolik dan Protestan. Karena faktor ini, Gereja memiliki pengaruh yang amat besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Gereja merupakan salah satu pusat pembentukan moralitas dan nilai-nilai kehidupan masyarakat NTT. Namun kendati peran Gereja begitu besar, persoalan-persoalan sosial masyarakat tetap sering terjadi. Salah satu persoalan yang cukup menonjol adalah persoalan ketidakadilan berbasis gender. Ketidakadilan ini termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengnomorduaan perempuan dalam bidang Pendidikan dan pekerjaan, dan pengmarginalisasian perempuan dalam berbagai keputusan penting dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Salah satu sebab utama ketidakadilan berbasis gender ini adalah sistem patriarkal yang begitu kuat. Sebagian besar masyarakat NTT menganut sistem ini. Dalam sistem patriarkal, hubungan kekerabatan dihitung melalui garis keturunan ayah (Raho, 2003). Sistem ini menimbulkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Di Wilayah Manggarai misalnya, perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan tersebut terjadi sejak seseorang dilahirkan ke tengah dunia ini. Sejak kelahirannya, anak laki-laki disebut sebagai ata one (orang dalam), sedangkan anak perempuan disebut sebagai ata pe'ang (orang luar) (Selatang, 2016). Laki-laki berhak atas warisan leluhur dan mereka menjadi penentu kebijakan dalam segala urusan adat. Sedangkan perempuan dianggap sebagai bagian dari keluarga suaminya dan tidak terlalu berwenang dalam urusan adat (Janggur, 2010). Dalam masyarakat patriarkat,s perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan itu sangat menonjol. Laki-laki cenderung mendominasi semua peran di sektor publik. Sementara itu perempuan dianggap tidak berkompeten dan dianggap tidak penting di sektor publik (Selatang F, 2020). Wilayah kerja perempuan hanya sebatas pada lingkungan domestik rumah tangga. Tugas pokok perempuan adalah mengasuh anak, memasak dan membersihkan rumah (Eriksen, 2009).

Persoalan mengenai ketidakadilan berbasis gender di NTT pernah diteliti oleh Konradus Doni Kelen. Ia meneliti tentang tradisi kawin tangkap di Sumba dan menemukan bahwa tradisi kawin tangkap ini merupakan praktik perendahan terhadap martabat perempuan karena terjadi hanya karena kesepakatan orang tua, tanpa ikatan cinta yang sungguh-sungguh dari kedua mempelai. Menurutnya akar utama lestarinya tradisi kawin tangkap ini adalah budaya patriarkal yang terlalu kental di Pulau Sumba, NTT (Kelen, 2022). Penelitian lainnya

Is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License

JURNAL
PELAYANAN
PASTORAL
ISSN: 2747-1284
Tahun (2025), Vol. (6) No. (1), Bulan (April), p. (52-61)

dibuat oleh Meo dan Boro. Mereka membuat penelitian mengenai perekrutan Aparatur Sipil Negara yang menempati jambatan tertentu dalam lingkup pemerintah daerah (Pemda) Provinsi NTT. Mereka menemukan bahwa jabatan struktural dalam lingkup Pemda Provinsi NTT didominasi oleh laki-laki karena rendahnya minat perempuan sendiri untuk menempati jabatan struktural (Meo & Boro, 2021). Peneltian lain lagi dibuat oleh Daytana dan Salmun. Mereka meneliti tentang pengaruh ketimpangan gender terhadap kondisi ketersediaan air minum bersih di desa Maradesa Timur Kabupaten Sumba Tengah. Berdasarkan penelitian ditemukan pemahaman yang rendah terhadap kesetaraan gender meningkatkan beban kerja perempuan dalam mengakses air bersih. Masyarakat Maradesa Timur memahami bahwa salah satu tugas pokok perempuan adalah menjamin ketersediaan air minum bersih di rumah (Daytana & Salmun, 2021). Dalam artikel ini, peneliti akan merangkum berbagai manifestasi ketidakadilan berbasis gender yang terjadi di NTT dalam satu dekade terakhir berdasarkan berita yang tersebar di media cetak dan online maupun berdasarkan informasi yang tersedia pada webside resmi pemerintah. Sebagaian kebaruan utama dalam artikel ini, peniliti akan menganalisis secara teologis pilihan sikap dan kebijakan-kebijakan pastoral gereja di tengah realitas ketidakadilan gender di Provinsi NTT.

Secara teologis, Gereja merupakan tempat untuk mengajarkan nilai-nilai kasih, keadilan dan kesetaraan. Perempuan NTT pada dasarnya berharap banyak pada Gereja untuk membebaskan mereka dari berbagai belenggu ketidakadilan berbasis gender. Berhadapan dengan realitas semacam ini, muncul pertanyaan penting: pertama; “Bagaimana seharusnya Gereja bersikap di tengah realitas ketidakadilan gender di NTT? Kedua; apa upaya konkret yang bisa dibuat oleh gereja untuk mengatasi ketidakadilan berbasis gender? Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap ideal dan langkah-langkah konkret yang seharusnya dibuat oleh Gereja di tengah konteks ketidakadilan berbasis gender di NTT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan. Peneliti membaca buku-buku, jurnal, laporan penelitian dan berita-berita di media massa online maupun cetak mengenai ajaran Gereja Katolik dan situasi ketidakadilan gender dalam konteks Nusa Tenggara Timur. Data-data yang diperoleh dari hasil bacaan kemudian diinterpretasi seturut perspektif terori gender sehingga dapat ditemukan berbagai manifestasi dan akar persoalan ketidakadilan berbasis gender di NTT dalam satu dekade terakhir. Hasil interpretasi tersebut selanjutnya ditelaah lebih jauh menurut perspektif teologi Kristen sehinnga peneliti dapat mendeskripsikan sikap-sikap ideal dan langkah-langkah konkret yang harus ditempuh oleh Gereja di tengah konteks ketidakadilan berbasis gender di NTT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gender merupakan penciri yang yang membedakan maskulinitas (kelaki-lakian) dengan femininitas (keperempuanan). Pembedaan karakteristik tersebut bergantung pada konteks, bisa mencakup jenis kelamin dan juga bisa mencakup hal-hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin (Wikipedia, n.d.). Gender berbeda dengan seks (jenis kelamin)

Is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License

JURNAL
PELAYANAN
PASTORAL
ISSN: 2747-1284
Tahun (2025), Vol. (6) No. (1), Bulan (April), p. (52-61)

(Azis, 2013). Jenis kelamin membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat biologis manusia. Misalnya laki-laki memiliki penis, jakun dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim dan memproduksi sel telur. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan serta tidak bisa dipertukarkan satu sama lain. Sedangkan gender lebih berkaitan dengan kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Eriksen, 2009).

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu terjadi secara kodrati. Sedangkan gender berkaitan dengan sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural (Fakih, 2008). Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak didasarkan pada perbedaan biologis atau kodrati, tetapi dibedakan menurut kedudukan dan peranan masing-masing dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara lebih gamblang, Anne Hommes mengemukakan bahwa pola pergaulan antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh peranan, yang mengatur perilaku seseorang dan oleh kedudukan, yang menunjukkan posisinya dalam masyarakat. Sikap dan pola tingkah laku itu merupakan bentukkan masyarakat yang diperoleh seseorang melalui proses sosialisasi (Hommes, 1992).

Sebelum dijelaskan secara rinci manifestasi ketidakadilan gender, konsep tentang ketidakadilan gender itu sendiri perlu diberi batasan. Mansour Fakih mendefenisikan ketidakadilan gender sebagai sebuah sistem atau struktur di mana seseorang ditempatkan dalam masyarakat berdasarkan jenis kelaminnya (Fakih, 2008). Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi (tidak sepenuhnya terlibat dalam aktivitas politik), pembentukan stereotype dan beban kerja (pelabelan negatif), serta kekerasan. Manifestasi ketidakadilan ini saling berkaitan dan berhubungan serta saling mempengaruhi satu sama lain (Fakih, 2008).

Adapun manifestasi bentuk ketidakadilan gender dalam konteks NTT adalah sebagai berikut. Pertama, marginalisasi kaum perempuan. Marginalisasi kaum perempuan adalah proses meminggirkan kaum perempuan dari dunianya yang membuat mereka berada pada posisi lemah karena sebuah sistem yang menindas. Sistem itu sengaja diciptakan seperti kebijakan pemerintah, keyakinan religius (tafsiran agama), dan juga keyakinan kultural. Marginalisasi terhadap kaum perempuan, tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat yang lebih luas dan bahkan negara (Fakih, 2008).

Akibat paling nyata dari marginalisasi ini adalah banyaknya kaum perempuan yang menderita kemiskinan. Menurut Yeftha Yerianto Sabaat, dalam konteks NTT, ada beberapa kebijakan pemerintah provinsi NTT yang mengakibatkan terjadinya marginalisasi kaum perempuan. Pertama, wacana peraturan tentang pelegalan minuman keras (miras). Wacana peraturan ini menuai pro dan kontra. Pihak yang pro lebih melihat keuntungan ekonomis dari bisnis minuman keras ini. Sedangkan pihak yang kontra lebih melihat dampak buruk minuman keras ini bagi kesehatan pribadi dan hubungan sosial. Salah satu faktor penyebab dominan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah akibat pengaruh minum keras. Yang paling sering menjadi korban KDRT adalah perempuan dan anak-anak. Kedua, wacana tentang perda perempuan NTT menenun. Menurut Yefta, peraturan ini memang sangat baik untuk menjaga kelestarian budaya. Namun aturan ini cenderung tidak adil bagi perempuan. Perempuan seakan-akan dilabeli dengan tanda penenun. Akibatnya perempuan yang tidak tahu

Is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License

JURNAL
PELAYANAN
PASTORAL
ISSN: 2747-1284
Tahun (2025), Vol. (6) No. (1), Bulan (April), p. (52-61)

menenun dianggap sebagai momok dalam masyarakat. Apalagi ada sanksi bahwa perempuan yang tidak bisa menenun tidak boleh menikah (Yefta Yerianto Sabaat, 2019) .

Tidak hanya dalam dunia pekerjaan, dalam ranah budaya dan domestik kaum perempuan juga mengalami proses marginalisasi. Kebijakan terkait penentuan hak waris merupakan contoh nyatanya. Dalam banyak budaya yang hidup dan berkembang di NTT, kebijakan soal ahli waris sangat tidak menguntungkan kaum perempuan yang mana hanya kaum laki-laki yang mendapat hak waris dari keluarga atau orang tua. Dalam hal ini menjadi jelas bahwa lagi-lagi jalan menuju kemiskinan selalu berada di posisi kaum perempuan. Hal ini nampak sangat jelas misalnya dalam masyarakat Manggarai seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan.

Dalam situasi terjepit antara hilangnya peluang dan akses untuk mendapatkan pekerjaan layak di tanah sendiri dan dikejar dengan kebutuhan hidup, banyak kaum perempuan NTT terpaksa merantau ke luar negeri. Mereka pada umumnya berharap agar nasib bisa berubah di tanah rantau. Namun keadaan yang terjadi justru jauh dari yang diharapkan. Mereka justru sering menjadi korban penganiayaan, pelecehan seksual, dan perdangan manusia. Ada beberapa data yang membuktikan hal ini. Data Badan Nasional Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT berdasarkan jenis kelamin didominasi kelompok perempuan. Terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 terdapat 6.846 TKI Perempuan. Kemudian pada tahun 2015 terdapat 1.667 TKW asal NTT yang menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking)* (Saputra, 2018).

Kedua, Gender dan subordinasi. Subordinasi adalah relasi yang sengaja dibangun atas dasar sebuah keyakinan bahwa kelas sosial tertentu atau jenis kelamin tertentu lebih unggul dari yang lain. Ada sebuah sikap superioritas atas jenis kelamin tertentu. Pandangan seperti ini selalu memposisikan perempuan sebagai kelas kedua dalam masyarakat yang status sosialnya di bawah laki-laki. Perempuan dianggap sebagai kelompok yang paling lemah, karena itu mesti diberi tempat khusus dalam masyarakat. Artinya, ia tidak diberi ruang kebebasan seperti laki-laki, akses terhadap pendidikan juga dibatasi bahkan tidak diberi ruang sepenuhnya untuk terlibat dalam ativitas politik (Fakih, 2008).

Berdasarkan data dari Webside resmi pemerintah provinsi NTT, porsentase melek huruf penduduk 10 tahun ke atas berdasarkan jenis kelamin di NTT pada tahun 2016 adalah 92,60 % dengan rincian lak-laki 93,93 % dan perempuan 91,31 % (Pemprov NTT, 2016). Berdasarkan data ini dapat diketahui bahwa porsentase melek huruf perempuan NTT lebih rendah dari porsentase melek huruf laki-laki. Hal ini terjadi karena akses mereka terhadap dunia pendidikan dibatasi. Di banyak tempat di NTT, anak laki-laki masih lebih diprioritaskan untuk sekolah ketimbang anak perempuan.

Pandangan bahwa kaum perempuan itu irasional membuat kaum perempuan tidak mendapat kepercayaan untuk berkancah di dunia publik seperti dunia politik. Dalam pemilihan legislatif NTT periode 2019-2024, hanya ada 12 orang perempuan yang lolos menjadi DPRD NTT dari 65 orang. Pada pemilihan legislatif periode 2024-2029 memang ada penambahan jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD NTT, yakni bertambah tiga orang sehingga sekarang ada 15 orang perempuan yang menjadi anggota DPRD NT. Namun jika dibuat perbadingan secara keseluruhan, persentase keterwakilan perempuan tetap kecil jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang terpilih menjadi anggota DPRD NTT (I Wayan Sui Suadnyana, 2024).

Is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License

JURNAL
PELAYANAN
PASTORAL
ISSN: 2747-1284
Tahun (2025), Vol. (6) No. (1), Bulan (April), p. (52-61)

Ketiga, Gender dan stereotipe. Secara umum, stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok sosial tertentu. Stereotipe yang diberikan selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan terhadap kelompok sosial yang diberi label tersebut. Perempuan sebagai kelompok sosial dalam masyarakat juga diberi label sebagai kelompok yang irrasional, cenderung menggunakan perasaan daripada rasio. Selain itu, perempuan juga diberi label sebagai ibu rumah tangga dan wilayah kerjanya bersifat domestik. Kalaupun ada sesuatu yang dihasilkan, cenderung tidak dihitung karena dianggap sebagai sambilan atau tambahan saja (Fakih, 2008).

Menurut Yayasan Plan International Indonesia, salah satu isu yang menjadi momok bagi perempuan NTT, khususnya di wilayah Flores adalah isu kekerurangan air bersih. Dalam masyarakat, ada pandangan umum bahwa tugas pokok yang dibebankan kepada perempuan dan anak perempuan adalah untuk menyediakan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Kondisi daerah yang kering menyebabkan perempuan harus menempuh perjalanan jauh untuk mengambil air bersih dari sumber air terdekat. Hal ini menyebabkan anak-anak perempuan sering kehilangan waktu belajar dan bermain. Mereka juga menghadapi resiko yang tinggi akibat minimnya perlindungan saat menempuh jalan yang cukup jauh tersebut (Sutriyanto, 2019).

Keempat, gender dan kekerasan. Kekerasan sering kali dialami perempuan, baik kekerasan fisik, psikis dan verbal. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Perempuan selalu berada dalam posisi yang sangat lemah dalam masyarakat. Kekerasan yang paling umum yang terjadi dalam diri perempuan adalah kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (domestic violence), kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berenca, dan lain-lain. Singkatnya, perempuan rentan dieksploitasi karena ia berada pada posisi yang lemah dalam masyarakat (Fakih, 2008).

NTT merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kekerasan terhadap kaum perempuan paling banyak. Menurut data dari Rumah Perempuan Kupang, sebagaimana yang dikutip oleh Liputan6.com, sejak tahun 2002 sampai tahun 2017, sudah ada 3621 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di NTT (Keda, 2018).

Pembahasan

Para pejuang gender menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Bagi mereka, peran gender hanya konstruksi masyarakat karena itu dapat diubah. Peran dan kedudukan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat saling dipertukarkan. Misalnya: perempuan juga memiliki kemampuan untuk memimpin dan sanggup berpikir secara rasional. Mereka menolak segala anggapan yang meremehkan dan merendahkan kemampuan perempuan. Kajian analisis gender berusaha mengeluarkan perempuan dari kerangkeng penindasan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Pada zaman Yesus, perempuan juga sering menjadi korban penindasan dan ketidakadilan. Apalagi Yesus hidup di lingkungan budaya Yahudi yang sangat patriarkal. Sebagaimana pada umumnya dalam budaya patriarkal, dalam masyarakat Yahudi perempuan juga sering disubordinasikan dan dianggap sebagai warga kelas kedua. Pandangan ini merupakan warisan tradisi lama masyarakat Yahudi. Perempuan dianggap sebagai permulaan dosa (Sir. 25:24). Hanya laki-laki yang diperhitungkan di hadapan hukum. Kontribusi utama

Is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License

JURNAL
PELAYANAN
PASTORAL
ISSN: 2747-1284 Tahun (2025), Vol. (6) No. (1), Bulan (April), p. (52-61)

perempuan sebagai istri adalah anak dan kenikmatan seksual, dan ini dilihat sebagai hak eksklusif suami. Perempuan tidak berhak menerima harta warisan karena ia akan menikah dan bergabung dengan suami. Dalam hal keagamaan pun perempuan tidak memiliki kekuatan hukum. Peran utama bagi hampir semua perempuan Yahudi ialah sebagai istri (Tisera, 2004).

Yesus menantang pandangan masyarakat tentang perempuan. Ia menolak segala bentuk marginalisasi perempuan akibat pandangan tradisi lama Yahudi. Buktinya, Yesus memiliki beberapa murid perempuan yang setia mengikutiNya, seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome (Mrk. 15:40-41). Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di tempat umum, meskipun hal tersebut pada waktu itu dilarang atau dianggap tidak biasa (Yoh. 4) (Tisera, 2004). Yesus menyelamatkan perempuan yang hampir dirajam karena kedapatan berbuat zinah (Yoh. 7:53-8:11). Dalam peristiwa ini, Yesus berhasil menggugat pemahaman ahli taurat dan orang Farisi tentang dosa. Bagi mereka, dalam peristiwa itu, hanya perempuan yang kedapatan berzinah itu yang berdosa dan layak dirajam. Sementara laki-laki yang berzinah dengan dia tidak disinggung. Mereka juga merasa diri sebagai orang benar karena hidup setia seturut hukum Taurat. Yesus menggugat mereka dengan pernyataan: "Barangsiapa dari antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Pada bagian akhir perikop ini dikisahkan bahwa tidak seorang pun yang melempari perempuan itu. Dengan demikian, mereka juga merasa bahwa diri mereka berdosa. Melalui peristiwa ini, Yesus berusaha mengangkat kesetaraan manusia, entah itu laki-laki maupun perempuan, semuanya dapat berdosa dan menjadi sumber dosa. Hal ini jelas bertentangan dengan pandangan Yahudi yang lebih melihat perempuan sebagai sumber dosa.

Gereja universal pada umumnya dan Gereja lokal NTT pada khususnya dipanggil untuk melanjutkan karya misi Yesus di tengah dunia. Misi utama Yesus adalah mewartakan Kabar Gembira tentang Kerajaan Allah (Selatang, 2017a, 2017b). Kerajaan Allah merupakan suatu situasi pembebasan dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Hal ini terbukti dalam manifesto pewartaann Yesus:

> "Roh Tuhan ada padaKu, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan ia mengutus Aku untuk membertitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang (Luk. 4: 18-19)"

Penginjil Lukas mengutip pernyataan ini dari Yesaya 61:1. Belajar dari Yesus, Gereja juga secara tegas menyatakan keberpihakannya kepada orang yang menderita dan diperlakukan tidak adil. Konsili Vatikan II dalam Gaudium Et Spes, art. 1 secara tegas menyatakan: "Kegembiraan dan Harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga."

Sepanjang sejarah, perempuan sangat rentan menjadi korban penindasan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Penindasan dan ketidakadilan itu merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat yang menganut sistem patriarkat, seperti masyarakat NTT penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan itu bahkan terjadi dengan sangat nampak. Hal ini menyebabkan perempuan sangat rentan mengalami penderitaan. Menurut Walter Bruggemann, dalam bukunya Prophetic Imagination, dalam

Is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License

JURNAL
PELAYANAN
PASTORAL
ISSN: 2747-1284
Tahun (2025), Vol. (6) No. (1), Bulan (April), p. (52-61)

situasi budaya dominan seperti dalam sistem patriarkat di NTT tersebut, Gereja mesti hadir sebagai nabi yang memberi kesadaran alteranatif kepada umat Allah. Brueggeman mengatakan: *"The task of prophetic ministry is to nurture, nourish, and evoke a consciousness and perception alternative to the consciousness and perception of the dominant culture around us"* (Bruggemann, 1978). Dalam konteks masyarakat patriarkat seperti di NTT, Gereja mesti menghadirkan kesadaran dan persepsi alternatif yang lebih mengangkat harkat dan martabat perempuan dan memperjuangankan kesetaraan perempuan dan laki-laki.

Dalam diri Gereja itu sendiri, perempuan sebenarnya telah mulai memperjuangkan berbagai kepentingan mereka. Bahkan muncul gerakan perempuan Kristen yang berusaha mengembangkan teologi baru yang lebih menampilkan sifat keperempuanan Allah, karya misi Yesus dan karya misi Gereja. Kelompok perempuan ini mengembangkan teologi feminis. Mereka mengeritik teologi tradisional sebagai teologi yang sangat kuat dipengaruhi oleh budaya patriarkat. Jana Opecenska mengatakan "Teologi tradisional menafsirkan hubungan Allah dengan manusia menurut skema patriarkal. Tuhan dipikirkan sebagai sesuatu yang sangat tinggi: Raja, komandan militer, pemenang, hakim, Bapak" (Opecenska, 1995) Bagi teolog feminis, Allah yang digambarkan dalam teologi tradisional terlalu maskulin. Rosemary Radford Rueter dengan cukup tegas mengatakan bahwa: *"Cristian feminist theology seeks to reconstruct all the basic symbols in the theological system, God, humanity as male and female, creation, sin, redemption, the person and work of Christ, the church, and future hope in a gender-inclusive and egalitarian way."* (Rueter, 1983).

Oleh karena itu, menurut peneliti, ada empat langkah konkret yang mesti diambil oleh Gereja untuk mengatasi ketidakadilan gender di NTT. Pertama, menguatkan kajian teologi feminis. Pandangan umum masyarakat NTT tentang Allah pada dasarnya bersifat dualistik. Allah merupakan gabungan dari Bapak dan Ibu, langit dan bumi. Menurut Fransiska Widyawati, teologi Kristiani "import" yang hanya menyapa Allah sebagai Bapa sebenarnya kurang relevan dengan akar budaya kita yang menyapa Allah sebagai Bapak dan ibu sekaligus. Menurutnya teologi mengenai Allah yang relasional dalam Bapak dan Ibu harus dihidupkan dan dikembangkan (Widyawati, 2012).

Kedua, setiap Keuskupan di NTT mesti memiliki struktur dan program khusus yang bersentuhan langsung dengan persoalan perempuan. Ketiga, Gereja sebaiknya mempercayai perempuan utnuk menjabat posisi-posisi strategis. Selama ini ada kesan bahwa perempuan hanya terlibat dalam urusan yang berkaitan dengan makan minum dan hias altar. Keempat, harus ada budget atau anggaran khusus untuk perempuan. Hal ini bertujuan agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masalah perempuan diprioritaskan, bukan menjadi program sampingan.

Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini ada banyak lembaga dan komunitas Gereja Katolik yang telah berusaha secara nyata membangun dialog dan memperjuangakan nasib para korban ketidakadilan gender di NTT. Untuk sekedar menampilkan beberapa contoh, di Ruteng misalnya ada Kongregasi Suster-suster Gembala Baik yang selama ini menangani dan mendampingi ibu-ibu korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang hamil di luar nikah, dan pendampingan komunitas ibu-orang tua tunggal (Komnas Perempuan, 2009). Di wilayah Maumere ada lembaga TRUK F (Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores) yang banyak menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus perdaganan orang (Komnas Perempuan, 2009). Lembaga-lembaga

Is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License

JURNAL
PELAYANAN
PASTORAL
ISSN: 2747-1284
Tahun (2025), Vol. (6) No. (1), Bulan (April), p. (52-61)

Swadaya masyarakat seperti ini harus didukung penuh oleh Gereja dan pemerintah guna menanggulangi persoalan ketidakadilan terhadap perempuan di NTT.

Keempat langkah konkret di atas merupakan wujud konkret sinodalitas Gereja. Sinodalitas menekankan partisipasi semua pihak dalam menjalankan misi wewartakan Kerajaan Allah ke tengah dunia. Terminologi kunci dalam konsep Gereja yang sinodal adalah "berjalan bersama". Semua pihak diajak untuk sama-sama berziarah di tengah dunia untuk membangun dunia yang lebih baik (Buru, 2023). Selama ini, bentuk-bentuk partisipasi perempuan masih sangat terbatas. Perempuan hanya sebatas terlibat dalam urusan anggota koor dan terlibat dalam berbagai kehidupan doa. Peneliti meyakini bahwa perempuan harus dilibatkan dalam secara penuh dalam setiap kebijakan strategis pastoral dan setiap kebijakan pastoral harus berperspektif gender. Perempuan juga memiliki andil besar untuk melaksanakan misi Allah ke tengah dunia ini.

KESIMPULAN

Berhadapan dengan realitas ketidakadilan berbasis gender tersebut, Gereja mesti menyatakan keberpihakannya kepada korban dan menempuh langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Langkah-langkah konkret tersebut antara lain, penguatan kajian teologi feminis, pembentukan struktur dan program yang bersentuhan langsung dengan kaum perempuan, mempercayakan perempuan untuk menjabat posisi-posisi strategis dalam gereja, dan penetapan budget khusus untuk program perempuan. Namun tidak dapat dipungkuri bahwa sudah ada banyak bentuk karya nyata yang sudah dilakukan oleh Gereja untuk mengatasi situasi ketidakadilan gender di NTT.

DAFTAR PUSTAKA

Azis, A. (2013). Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen; suatu pendekatan hukum yang perspektif gender . Yogyakarta: Rangkang Educaation.

Bruggemann, W. (1978). Prophetic Imagination. USA: Fortress press.

Buru, P. M. (2023). "Misi Gereja Sinodal: Partisipasi dalam Missio Dei untuk Membangun Comunnio". Retrieved from www.mirifica.net: https://www.mirifica.net/misi-gereja-sinodal-partisipasi-dalam-missio-dei-untuk-membangun-communio/

Daytana, O. H., & Salmun, J. A. (2021). PENGARUH KETIMPANGAN GENDER PADA PEREMPUAN TERHADAP KONDISI KETERSEDIAAN AIR BERSIH RUMAH TANGGA DI DESA MARADESA TIMUR KABUPATEN SUMBA TENGAH . Media Kesehatan Masyarakat , 155-164.

Eriksen, T. H. (2009). Antropologi Sosial dan Budaya. Maumere: Ledalero.

Fakih, M. (2008). Analisis Gender & Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hommes, A. (1992). Perubahan peran pria & wanita dalam Gereja & Masyarakat . Yogyakarta: Kanisius & BPK Gunung Mulia.

I Wayan Sui Suadnyana, S. S. (2024, September 03). www.detik.com. Retrieved from detikbali: https://www.detik.com/bali/nusra/d-7522937/65-anggota-dprd-ntt-periode-2024-2029-dilantik

Janggur, P. (2010). utir-butir Adat Manggarai. Ruteng: Yayasan Sri Bongkok.

Keda, A. O. (2018, April 03). Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di NTT Masih Tinggi. Retrieved from www.liputan6.com: https://www.liputan6.com/regional/read/3422564/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-ntt-masih-tinggi

Is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISSN: 2747-1284
Tahun (2025), Vol. (6) No. (1), Bulan (April), p. (52-61)

Kelen, K. D. (2022). Kawin Tangkap di Sumba dan Ketidakadilan Gender. Jurnal Ideas, 625-632.

Kewuel, Hipolitus, K., dkk; (2017). Seri Studi Kebudayaan I Pluralisme, Multikulturalisme, Dan Batas-Batas Toleransi. //digilib.unmul.ac.id/colection/index. php?p=show_detail&id=4841

Komnas Perempuan. (2009). Memecah Kebisuan; Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan demi Keadilan, Respon Katolik. Jakarta: Komnas Perempuan.

Meo, E. N., & Boro, V. I. (2021). Kesetaraan Gender dalam Perekrutan Aparatur Sipil Negara Menempati Jabatan Struktural di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perspektif, 204-210.

Opecenska, J. (1995). Feminist Theology. Indian Journal of Theology , 40-46.

Pemprov NTT. (2016). Pendidikan. Retrieved from WWW.nttprov.go.id: WWW.nttprov.go.id

Raho, B. (2003). Keluarga Berziarah Lintas Zaman. Ende: Nusa Indah.

Redaksi Suara Sikka. (2019, Mei 08). Inilah 35 Anggota DPRD Sikka Periode 2019-2024. Retrieved from suarasikka.com: https://suarasikka.com/2019/05/08/inilah-35-anggoa-dprd-sikka-periode-2019-2024

Rueter, R. R. (1983). Sexism and God-Talk: Toward a Feminist Theology. New York: Beacon Pr.

Saputra, K. A. (2018, Maret 27). Memikirkan marginalisasi perempuan di NTT. Retrieved from Indoprogres.com: https://indoprogress.com/2018/03/memikirkan-marjinalisasi-perempuan-ntt,

Selatang, F. (2016). Unisitas Dan Universalitas Keselamatan Yesus Dalam Konteks Pluralitas Agama Di Indonesia. Jurnal Masalah Pastoral, 4(1), 1–10. https://doi.org/10.60011/jumpa.v4i1.19

Selatang, F. (2017a). Bahasa Dalam Hermeneutika Hans-Georg Gadamer. In FIDES ET RATIO Jurnal Teologi dan Filsafat: Vol. 2 No.1.

Selatang, F. (2017b). Gereja Musafir Sebagai Antisipasi Hidup Eskatologis. In Jurnal Masalah Pastoral (Vol. 5, Issue 2). https://doi.org/10.60011/jumpa.v5i2.48

Selatang F. (2020). Membingkai Relasi Orang Hidup Dan Mati Melalui Tradisi Lisan Upacara Teing Hang. https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2020.004.01.05

Sutriyanto, E. (2019, Oktober 02). Timbulnya Isu Kesetaraan Gender di NTT karena Minimnya Akses Air Bersih. Retrieved from www.tribunnews.com: https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/02/timbulnya-isu-kesetaraan-gender-di-ntt-karena-minimnya-akses-air-bersih

Tisera, G. (2004). Perempuan Di Tengah Dunia Lelalki. Jurnal Ledalero, 7-13.

Widyawati, F. (2012). Gereja dan Perempuan Manggarai: dari altar ke medan publik. In M. C. Suwendi, Iman, Budaya, dan Pergumulan Sosial; refleksi yubileum 100 tahun Gereja Katolik Manggarai (p. 362). Jakarta: Obor.

Wikipedia. (n.d.). Gender-Wkipedia, https://en.m.wikipedia.org . Retrieved from WWW.Wikipedia.org: Gender-Wkipedia, https://en.m.wikipedia.org

Yefta Yerianto Sabaat. (2019, Maret 14). Perempuan NTT di Persimpangan Jalan. Retrieved from Kupang.tribunnews.com: http://www.Kupang.tribunnews.com

Is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License